

DASAR HUKUM SIADA BAJA POLRI

Dasar Hukum :

1. Per-LKPP No.10 Tahun 2021
 - Pasal 4 huruf g
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah
 - Pasal 6 huruf d
Pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah

2. Instruksi Presiden No.2 Tahun 2022
 - Instruksi Umum No.13
Mengalihkan proses pengadaan yang manual menjadi pengadaan secara elektronik paling lambat tahun 2023
 - Instruksi Umum No.16
Melakukan integrasi data dan informasi mengenai produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi melalui penerapan Satu Data Indonesia (SDI) dalam rangka mendukung kebijakan berbasis data dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai kerangka Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)